

PENDIDIKAN ISLAM, CIVIL SOCIETY DAN PROBLEM STANDARISASI MUTU

Oleh: Mutmainah¹

email: mutmainah.zainul@yahoo.com

***Abstract:** Civil society, in the perspective of education (Islamic education), is a great subject owned by Islamic education in educational empowerment of the people as a whole. With its proximity to the Muslim community, Islamic education is a subject in the formation of civil society at the grassroots of Muslims. Civil society, in the perspective of Islamic education, is a significant topic that is actually owned by Islamic education in the empowerment of community education in a comprehensive manner. Islamic education, based on a community-based education, became one of the foundations in creating a civil society. Islamic education can be a vehicle for "critical pedagogy" (critical education), for the people; freeing the lowest layer of society from backwardness and poverty.*

***Keywords:** education, Islam, civil society, the quality*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu yang hakiki dan mutlak harus diperoleh warga negara serta wajib disediakan oleh negara dalam rangka menunjang proses pembangunannya, baik berupa pembangunan fisik ataupun pembangunan sosial budaya termasuk di dalamnya bidang pendidikan.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

¹Dosen Sekolah Tinggi Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU No. 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).²

Secara umum tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang baik.³ Secara umum pula diketahui bahwa bila setiap orang sudah menjadi orang baik maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang baik.⁴ Adapun tujuan pendidikan Islam menurut Muhaimin ada tiga fokus, *pertama*, terbentuknya insan kamil mempunyai wajah persaudaraan yang menumbuhkan sikap egalitarianism. *Kedua*, terciptanya insan kaffah yang memiliki dimensi-dimensi religius, budaya dan ilmiah. *Ketiga*, penyadaran manusia sebagai hamba dan khalifah Allah.⁵

Sesuai dengan sisdiknas pasal 54 ayat (1): menyatakan bahwa demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan masyarakat.⁶ Implementasi *civil society*⁷ (masyarakat madani)⁸ dalam pendidikan Islam adalah masyarakat madani itu sendiri

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

³Prof. Dr. Ahmad Tafsir. *Filsafat Pendidikan Islam*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2006) Hal: 93

⁴*Ibid*. Hal: 94

⁵A. Fatah Yasin. *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*. (Malang: UIN Malang Press. 2008) Hal: 111

⁶Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal: 57

⁷*Civil society* pertama kali dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah *societies civilis* yang identik dengan negara. *Civil Society* makna secara harfiah berarti “sipil” dan “masyarakat”, berasal dari bahasa Inggris, sehingga kalau diterjemahkan menurut kaidah bahasa Indonesia menjadi “masyarakat sipil”. Dalam perkembangannya istilah *civil society* dipahami sebagai organisasi masyarakat yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara serta keterkaitan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat.

⁸Pada konsep masyarakat madani yang merujuk negara–kota madinah tentu akan mengkritisi, bagaimana dasar-dasar konstitusi dan aplikasi dari tatanan negara – kota madinah tersebut. Masyarakat madani telah muncul sejak jaman Nabi Saw. Dan diyakini mampu melenyapkan sekat-sekat primordial yang pada waktu itu sangat tidak mungkin untuk dihilangkan. Masyarakat yang dibentuk oleh Nabi merupakan manifestasi dari keinginan untuk menghargai perbedaan kemanusiaan. Bahkan kelompok Al-Washliyah menganggap konsep “masyarakat madani” jauh lebih unggul dibanding dengan *civil society*

sebagai subyek dalam penerapan pendidikan Islam yang beradab. Karena pendidikan Islam yang beradab bisa terwujud apabila subyek yang menjalankan khususnya, dan masyarakat pada umumnya mempunyai adab yang baik. Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang merupakan implementasi *civil society* dalam pendidikan Islam.

Penyelenggaraan pendidikan Islam yang mengimplementasikan *civil society* dalam sistem pendidikan di sebuah negara akan berbeda dengan negara lainnya, karena sistem pendidikan yang diselenggarakan di berbagai negara mempunyai ciri yang sesuai dengan latar belakang negara masing-masing, dalam menganalisa dan membandingkan sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan di berbagai negara Islam maupun negara nonIslam. Perbandingan tersebut merupakan perbandingan pendidikan yang mengandung pengertian sebagai usaha yang digunakan untuk menganalisa dan mempelajari secara mendalam dua hal/aspek dari sistem pelaksanaan pendidikan, untuk mencari kesamaan-kesamaan yang ada dari/dalam kedua hal/aspek atau lebih tersebut.⁹

B. Sejarah *Civil Society*

Sejarah *civil society*, menurut filsuf Yunani Aristoteles memandang *civil society* sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. *Civil society* (masyarakat sipil), muncul pada masa pencerahan (*renaissance*) di Eropa sebagai sebuah konsep, *civil society* berasal dari proses sejarah panjang masyarakat Barat yang biasanya dipersandingkan dengan konsepsi tentang *state* (negara). Dalam tradisi Eropa abad ke-18, pengertian masyarakat sipil ini dianggap sama dengan negara (*the state*), yakni suatu kelompok atau kesatuan yang ingin mendominasi kelompok lain.¹⁰ Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana *civil society*. Pandangan Aristoteles selanjutnya dikembangkan oleh Marcus Tullius

yang sekuler karena konsep barat. Sementara masyarakat madani mengandung makna dan sifat spiritual.

⁹ Binti Maunah, *Perbandingan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 2

¹⁰ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 9-11.

Cicero (106-43 SM), Thomas Hobbes (1588-1679 SM), dan John Lock (1632-1704 SM).

Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), menamakannya dengan *societies civiles*, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas lain. Istilah yang digunakan Cicero lebih menekankan pada konsep negara kota (*city state*), yakni untuk menggambarkan kerajaan kota dan bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisir. Rumusan *civil society* selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679 SM) dan John Locke (1632-1704 SM), yang memandangnya sebagai kelanjutan dan evolusi *natural society*. Menurut Hobbes sebagai entitas *civil society* mempunyai peran untuk meredam konflik dalam masyarakat sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak, ia mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (perilaku politik) setiap warganya. Berbeda dengan Hobbes, menurut John Locke kehadiran *civil society* adalah untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara.

Fase kedua pada tahun 1767 Adam Ferguson mengembangkan wacana *civil society* dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia, dia lebih visi etis pada *civil society* dalam kehidupan sosial. Fase ketiga Thomas Paine (1792) mulai memaknai *civil society* sebagai suatu yang berlawanan dengan lembaga negara, bahkan ia dianggap sebagai antitesa negara. Menurut Paine terdapat batas-batas wilayah otonom masyarakat sehingga negara tidak diperkenankan wilayah sipil.

Fase keempat wacana *civil society* dikembangkan oleh GWF Hegel (1770-1831 M), Karl Marx (1818-1883 M) dan Antonio Gramsci (1891-1937). Dalam pandangan yang ketiganya *civil society* merupakan elemen ideologis kelas dominan. Sedangkan Hegel memandang *civil society* sebagai kelompok subordinatif terhadap negara. Karl Marx memandang *civil society* sebagai masyarakat borjuis, dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaan *civil society* merupakan kendala terbesar bagi upaya pembebasan manusia dari penindasan kelas pemilik modal. Mark Antonio Gramsci tidak memandang masyarakat sipil dalam konteks relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis.

Fase kelima, wacana *civil society* sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelin yang dikembangkan oleh Alexis Tocqueville (1805-1859). Pemikirannya lebih menempatkan masyarakat sipil sebagai sesuatu yang tidak ada priori maupun tersubordinasi dari lembaga negara. Sebaliknya *civil society* bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang terhadap kecenderungan intervensi negara atas warga negara.¹¹

C. *Civil Society* di Indonesia

Istilah atau konsep *civil society* di Indonesia pertama kali muncul dari kalangan sarjana Australia, tepatnya Monash University, melalui sebuah konferensi yang diselenggarakan dengan tema "*State and Civil Society in Contemporary Indonesia*", 25-27 Nopember 1988. Ini penting dicatat, mengingat bahwa pelaksanaan konferensi itu melibatkan seorang sarjana Indonesia, Arief Budiman, yang saat itu diundang sebagai George Hick Visiting Fellow pada Centre of Southeast Asian Studies, Monash University. Konferensi itu pula yang kemudian melahirkan sebuah buku yang disunting oleh Arief Budiman sendiri, dengan judul *State and Civil Society in Indonesia*. Buku tersebut, sejauh karya-karya terbitan tentang Indonesia, merupakan buku pertama yang secara eksplisit mengangkat istilah *civil society* di Indonesia. Sejak saat itulah istilah *civil society* semakin berkembang di Indonesia.

Mengkritisi sejarah perkembangan perpolitikan di Indonesia, penggal kedua kekuasaan adalah lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 merupakan titik awal lahirnya Orde Baru, dengan Jendral Suharto sebagai pemegang amanat SP ini dan dikukuhkan menjadi presiden Indonesia oleh MPRS Maret 1968. Persoalan utama yang harus ditata oleh Orde Baru adalah perekonomian dan stabilitas politik, perbaikan perekonomian

¹¹Tim MKD IAIN SA. Surabaya, *Civic Education*, 2012, Hal: 144.

diorientasikan “keluar” sementara format politik Orba ini mencoba menciptakan keseimbangan antara konflik konsensus.¹²

Penilaian pemerintah Orba oleh banyak intelektual dikatakan otoriter, hal ini dapat terlihat sejak tahun 1994 ada gejala melemahnya kekuatan masyarakat dalam ruang politik resmi, hasil pemilu 1997 menunjukkan bahwa kemenangan Golkar yang sangat telak dan hancurnya PDI merupakan hasil menguatnya sektor negara.¹³ Untuk itu diperlukan pemikiran-pemikiran kritis terhadap kecenderungan politik Orde Baru, khususnya LSM-LSM. Kalangan intelektual ini, yang kerap disebut “Muslim Transformis” melihat Politik Orde Baru dari sudut pandang pemikiran kritis dan teori ketergantungan, dan pada waktu yang sama mengagendakan pemberdayaan masyarakat untuk bisa terlibat dalam proses-proses politik dan kenegaraan. Perkembangan gagasan *civil society* di kalangan muslim berlangsung ketika orientasi baru gerakan Islam yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat tengah memperoleh tempat yang kuat. Karena itu mereka menerima gagasan *civil society* sebagai bagian dari agenda perjuangan, untuk mengatasi masalah-masalah sosial-politik yang dihadapi oleh muslim Indonesia.¹⁴

Sementara itu Azra menggambarkan, sejak paruh kedua dekade 1980-an terjadi perubahan-perubahan politik periode ini oleh Thaba dikategorikan hubungan antara Islam dan negara yang bersifat akomodatif yang signifikan, yakni sebagai pendorong proses demokratisasi dan perkembangan masyarakat madani. Pasca Mei 1998, bukti perubahan dari politik represi dan regimentasi yang menandai era Suharto berakhir, digantikan dengan politik yang lebih bebas dan demokratis. Era politik asas tunggal Pancasila telah tamat, partai-partaipun bermunculan dengan

¹²Nur Rokhim, *Civil Society di Indonesia Dalam Perspektif Islam*, (Al-Manar, Jurnal Sejarah dan Peradapan Islam, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Volume 11, No. 05, April 2012. Hal: 86.

¹³ Muhammad A.S. Hikam, *Islam, Domekratisasi, dan PemberdayaanCivil Society*, (Jakarta: PT. Erlangga, 2000), 30.

¹⁴Nur Rokhim, *Civil Society di Indonesia.....*, 87

menggunakan asas lain termasuk asas agama.¹⁵ Percepatan sosialisasi wacana *civil society* di Indonesia disebabkan beberapa faktor: yaitu: gencarnya penggunaan istilah *civil society* oleh berbagai kalangan, baik intelektual, aktivis LSM, maupun kalangan pemerintah. Banyak publikasi, baik buku, jurnal, majalah atau surat kabar, dan semakin terbukanya kebebasan menyampaikan pendapat, terutama sesudah runtuhnya Orba.

Munculnya sejumlah besar tokoh intelektual dan politik Indonesia, di antaranya Taufik Abdullah, Nurcholish Madjid, M. Dawam Rahardjo, dan Abdurrahman Wahid, dengan demikian gagasan *civil society* telah memasuki satu wilayah baru yang menjadi bagian dari praktik-praktik politik di Indonesia. Bangkitnya muslim *civil society* merupakan sebuah bukti bahwa proses demokratisasi di Indonesia makin kuat. Muncul pemikir Islam yang bekerja secara langsung dalam proses transformasi sosial ke arah yang lebih demokratis dan adil untuk menguatkan kembali "*society*" yang dilemahkan oleh pengaruh hegemoni *state* (negara).¹⁶

D. *Civil Society* dalam Perspektif Pendidikan Islam

Civil society dalam perspektif pendidikan (pendidikan Islam) adalah sebuah potensi besar yang sesungguhnya dimiliki pendidikan Islam dalam pemberdayaan pendidikan rakyat secara keseluruhan. Dengan kedekatannya kepada masyarakat muslim, pendidikan Islam merupakan potensi dalam pembentukan *civil society*, masyarakat madani, pada tingkat akar rumput (*grass roots*) kaum muslimin. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dapat menjadi sebuah wahana "pendidikan kritis" (*critical education*), bagi rakyat; membebaskan lapisan terbawah masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan. Di sini, pendidikan Islam dapat menjadi lembaga pendidikan penting dalam penanaman dan penumbuhan pendidikan demokrasi (*democracy education*), yang singkatnya secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep,

¹⁵*Ibid*, 88.

¹⁶ Muslim Abdurrahman, *Islam Sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta: PT. Erlangga, 2003), 41

sistem, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan, maka nilai-nilai dan pengertian-pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita, tidak dalam artian menjadikannya muatan kurikuler yang klise itu, tetapi dengan jalan merasakannya dalam hidup nyata (*lived in*) dalam sistem pendidikan. Kita harus mulai dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat pada umumnya kepada perbedaan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk menentukan pimpinan, membuat keputusan-keputusan dan menetapkan kebijakan-kebijakan.

Civil society dalam perspektif pendidikan Islam merupakan potensi signifikan yang sebenarnya dimiliki pendidikan Islam dalam pemberdayaan pendidikan umat secara komprehensif. Berbekal kedekatannya kepada umat Islam maka potensi untuk mewujudkan pembentukan *civil society* terbuka lebar. Dalam konteks ini, pendidikan Islam bisa menjadi jembatan (wahana kritis) bagi umat untuk mengangkat kaum marginal (sosial kelas bawah) dari keterbelakangan dan kemiskinan. Dalam wadah *Civil Society* pendidikan Islam bisa menjadi lembaga pendidikan penting dalam penanaman dan perkembangan pendidikan demokrasi yang secara substantif menyangkut sosialisasi dan aktualisasi konsep, system, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Nilai-nilai dan pengertian-pengertiannya harus dijadikan unsure yang menyatu dengan system pendidikan umat, bukan dalam pengertian menjadikannya muatan kurikuler yang klise tetapi dengan jalan merasakannya dalam kehidupan nyata dalam system pendidikan. Dengan *civil society*, masyarakat Islam harus benar-benar serius memikirkan dan membebaskan peserta didik dan masyarakat secara umum dari keterbelakangan, kemiskinan dan mau menerima perbedaan.

Pendidikan yang berbasiskan masyarakat (*community-based education*), adalah sesuai dengan misi pembangunan kita dewasa ini. Dengan ikutsertanya masyarakat di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya, maka pendidikan tersebut betul-betul berakar di dalam masyarakat dan di dalam kebudayaan. Dengan demikian lembaga-lembaga

pendidikan yang berfungsi untuk membudayakan nilai-nilai masyarakat Indonesia baru dapat memenuhi fungsinya dan semestinya hal ini dijadikan sinyal positif bagi manajer pendidikan Islam, bahwa peluang mengelola hubungan lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat semakin luas. *Community-based education* diharapkan menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan masyarakat madani, *civil society*. Dengan sendirinya, pendidikan Islam yang berdasarkan pada *community-based education* akan menampilkan wajah lain yang selama ini kita lihat telah mengasingkan lembaga pendidikan dari masyarakat.¹⁷

E. Perbandingan Pendidikan Islam, *Civil Society* dan Kebijakan Pemerintah dalam Standarisasi Mutu

Pendidikan Islam berperan sebagai moderator, dimana ajaran Islam dapat disosialisasikan kepada masyarakat dalam berbagai tingkatannya. Melalui pendidikan Islam inilah masyarakat dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah. Sehubungan dengan itu tingkat kedalaman pemahaman, penghayatan, dan pengamalan masyarakat terhadap ajaran Islam amat tergantung pada tingkat kualitas pendidikan Islam yang diterimanya.

1. Di Indonesia

Ketika berbicara *civil society* dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, maka lembaga pendidikan seperti madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dapat memainkan peran pemberdayaan dan transformasi *civil society* secara efektif. Disamping pondok pesantren, madrasah juga merupakan lembaga pendidikan Islam yang merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat dan transformasi *civil society*.

Madrasah sebagai bagian pendidikan Islami yang merupakan aktor dari *civil society*, maka lembaga ini harus bermutu. Dan untuk membuat pondok pesantren yang bermutu sangat erat kaitannya dengan adanya

¹⁷Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 112-113.

keterlibatan masyarakat secara totalitas di dalamnya. Mutu menuntut adanya komitmen pada kepuasan pelanggan yang memungkinkan adanya perbaikan pada para karyawan, siswa/santri dalam mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, Pada prinsipnya telah terimplikasinya kepada perubahan sistem manajemen pendidikan dari pola "sentralisasi" ke "desentralisasi" dalam pengelolaan pendidikan. Sebagai implementasi selanjutnya ialah dikembangkannya pendidikan yang demokratis dan non-monopolistik melalui upaya pengembangan berbasis sekolah/madrasah (*school based management*) atau *school based quality improvement management* (manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah/madrasah) yakni model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga madrasah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat) atau *stakeholders* untuk meningkatkan mutu madrasah.

Pendidikan harus mampu mengeksplorasi seluruh potensi anak. Dalam sisdiknas pasal 54 ayat (1): demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.¹⁸ Pasal 54 ayat (2): masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.¹⁹

Adapun secara teoritis konsep pemerintah ternyata telah menawarkan semua konsep tentang adanya demokrasi dalam pendidikan

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 57

¹⁹*Ibid*, 57

yang ada pada sisdiknas Bab III pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif.²⁰ Pasal 5 ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.²¹

Dalam konteks ini, madrasah memiliki peluang untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, dengan beberapa alasan: *pertama*, terjadinya mobilitas sosial, yakni munculnya masyarakat menengah baru terutama kaum intelektual yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan pesat.²² Karena itu, lembaga pendidikan yang mampu merespon dan mengapresiasi tuntutan masyarakat tersebut secara cepat dan cerdas akan menjadi pilihan masyarakat.

Kedua, munculnya kesadaran baru dalam beragama, terutama pada masyarakat perkotaan kelompok masyarakat menengah atas, sebagai akibat dari proses re-islamisasi yang dilakukan secara intens oleh organisasi-organisasi keagamaan, lembaga-lembaga dakwah atau yang dilakukan secara perseorangan.

Ketiga, arus globalisasi dan modernisasi yang demikian cepat perlu disikapi secara arif. Modernisasi dengan berbagai dampaknya perlu disiapkan manusia-manusia yang memiliki dua kompetensi sekaligus, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan nilai-nilai spiritualitas keagamaan. Fenomena munculnya madrasah yang bermutu, sebenarnya harus dipahami sebagai respon positif terhadap upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (*human resource*) Indonesia dalam rangka menghadapi tantangan global masa mendatang yang kehadirannya bersifat niscaya.

Strategi madrasah yang dikembangkan dalam penggunaan manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan adalah institusi pendidikan yang memosisikan dirinya sebagai institusi jasa atau dengan

²⁰*Ibid*, 38

²¹*Ibid*

²²Siswanto, *Budaya Madrasah: Strategi Pengembangan Mutu Pendidikan*, (Tadris Jurnal Tarbiyah STAIN Pamekasan, nomor: sti. 213/PP.009/91/2006). 216.

kata lain menjadi industri jasa, yakni institusi yang memberikan pelayanan (*service*) sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan (*customer*). Maka, pada saat itulah dibutuhkan suatu system manajemen yang mampu memberdayakan institusi pendidikan agar lebih bermutu.

Sedangkan kata mutu sebagai konsep yang relatif dalam *Total Quality Management* merupakan konsep yang dianggap muncul dari suatu produk atau layanan bukan atribut suatu produk. Mutu dalam sebuah layanan dinyatakan ada apabila sebuah layanan tersebut memenuhi spesifikasi yang ada. Konsep mutu dalam makna relatif akan memiliki dua dimensi, pertama sesuai dengan spesifikasi. Kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan (*user*). Hal ini yang pertama dalam konteks *Total Quality Management* merupakan mutu yang sesungguhnya (*quality in fact*). Artinya suatu produsen memproduksi secara konsisten sesuai dengan standar atau spesifikasi yang dilakukan, misalnya standar internasional yang diistilahkan dengan ISO9000. Sedangkan dimensi yang kedua adalah mutu yang diinterpretasikan oleh pelanggan, dalam konteks TQM mutu merupakan suatu yang dapat memuaskan, melampaui keinginan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Mutu versi kedua ini dikenal dengan sebutan *quality in perception*.

Dalam dunia pendidikan yang termasuk pelanggan dalam adalah pengelola institusi pendidikan, misalkan manajer, guru, staf, dan penyelenggara institusi. Sedangkan pelanggan luar adalah masyarakat, pemerintah, dan dunia industri. Jadi, suatu institusi pendidikan disebut bermutu apabila antara pelanggan internal dan eksternal telah terjalin kepuasan atas jasa yang diberikan.²³

Masih dijelaskan oleh Sallis,²⁴ bahwa dalam konsep *Total Quality Management* harus memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Secara operasional, mutu ditentukan oleh dua faktor, yaitu terpenuhinya spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya atau disebut *quality in fact*

²³Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, (London: Kogan Page, 2002). 6.

²⁴*Ibid.*

(mutu sesungguhnya) dan terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan menurut tuntutan dan kebutuhan pengguna jasa atau disebut *quality in perception* (mutu persepsi).

Untuk mewujudkan *total quality* dalam lembaga pendidikan Islam, implementasi pilar TQM dalam pengembangan kurikulum perlu menjadi pertimbangan dan perhatian serius. Pilar-pilar TQM tersebut adalah:

1. Fokus pada Pelanggan

Memuaskan harapan pelanggan berarti mengantisipasi kebutuhan pelanggan pada masa mendatang. Madrasah perlu mengembangkan fokus kualitas, setiap orang dalam sistem sekolah mesti mengakui bahwa setiap *output* lembaga pendidikan adalah *costumer*.²⁵

Pengembangan kurikulum lembaga pendidikan Islam dengan fokus pada kebutuhan masyarakat (pelanggan) diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang dibekali pengetahuan keahlian dalam agama sekaligus keduniaanya.²⁶ Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam akan dikatakan baik dan efektif jika lembaga pendidikan itu mencapai tujuannya dengan melahirkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan atau masyarakat.²⁷

2. Keterlibatan Total

Prinsip TQM dalam pengembangan kurikulum adalah setiap orang harus terlibat dalam transformasi kualitas. Manajemen mesti memiliki komitmen untuk memfokuskan pada kualitas, harus mendorong staf dan peserta didik untuk mengubah cara kerja lama kepada cara kerja baru. Perubahan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) kepada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 adalah bentuk mengubah cara kerja baru, dimaksudkan agar semua komponen dalam lembaga pendidikan ikut terlibat secara

²⁵ Arcaro, Jerome S. 1995. *Quality in Education: An Implementation Handbook*, St. Lucie Press, 11

²⁶ Hasibuan, Lies. 2004. *Melejitkan Mutu Pendidikan: Refleksi, Relevansi dan Rekonstruksi Curriculum*. Jambi: SAPA Project, 136.

²⁷ Arcaro, Jerome S. 1995. *Quality in Education.....*, 54

aktif dalam operasionalisasi lembaga pendidikan, pemberdayaan warga sekolah (pimpinan, tenaga administrasi, tenaga pendidik dan peserta didik).²⁸

Keterlibatan total dalam konteks pengembangan kurikulum berarti bahwa inisiatif bisa datang dari bawah seperti guru, orang tua peserta didik atau masyarakat sekitar (*stakeholders*), dan semua pihak itu memberikan secara penuh kemampuan yang dimiliki dan pelayanan yang optimal untuk mewujudkan kualitas yang diharapkan bahkan melebihi permintaan pelanggan (*costumer*) baik internal maupun eksternal.²⁹

3. Pengukuran

Dalam pengembangan TQM, pengukuran merupakan salah satu langkah yang penting dalam proses manajemen. Secara tradisional ukuran kualitas atas luaran lembaga pendidikan Islam adalah prestasi peserta didik. Ukuran dasarnya adalah hasil ujian baik Ujian Sekolah/madrasah (US) maupun Ujian Nasional (UN). Jika hasil ujian bertambah baik, maka kualitas pendidikan dikatakan juga membaik.³⁰Jika kualitas dapat dikelola, maka kualitas juga harus dapat diukur (*measurable*).

4. Komitmen

Untuk memberikan komitmen pada kualitas, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menerapkan TQM yaitu:

- mempelajari dan memahami TQM secara menyeluruh;
- memahami dan mengadopsi jiwa dan filosofi untuk perbaikan terus menerus;
- menilai jaminan kualitas saat ini dan program pengendalian kualitas;
- membangun sistem total kualitas;

²⁸Hasibuan, Lies. 2004. *Melejitkan Mutu Pendidikan.....*136.

²⁹Arcaro, Jerome S. 1995. *Quality in Education.....*, 78

³⁰*Ibid.*, 13

- mempersiapkan orang-orang untuk perubahan, menilai budaya kualitas sebagai tujuan untuk mempersiapkan perbaikan, melatih orang-orang untuk bekerja pada suatu kelompok kerja;
- mempelajari teknik untuk mengatasi akar persoalan dan mengaplikasikan tindakan korektif dengan menggunakan teknik-teknik alat TQM;
- menetapkan prosedur tindakan perbaikan dan menyadari akan keberhasilannya;
- menciptakan komitmen dan strategi yang benar tentang total kualitas oleh pimpinan yang akan menggunakannya;
- memelihara jiwa total kualitas dalam penyelidikan dan aplikasi pengetahuan yang amat luas.³¹

Aplikasi konsep TQM dalam prosedur pengembangan kurikulum berarti memaknai bahwa setiap langkah-langkahnya selalu diorientasikan pada kebutuhan pelanggan dengan mengedepankan aspek kualitas pada semua input dan prosesnya. Komitmen kualitas dibangun mulai dari level pimpinan tertinggi sampai pada level terbawah.

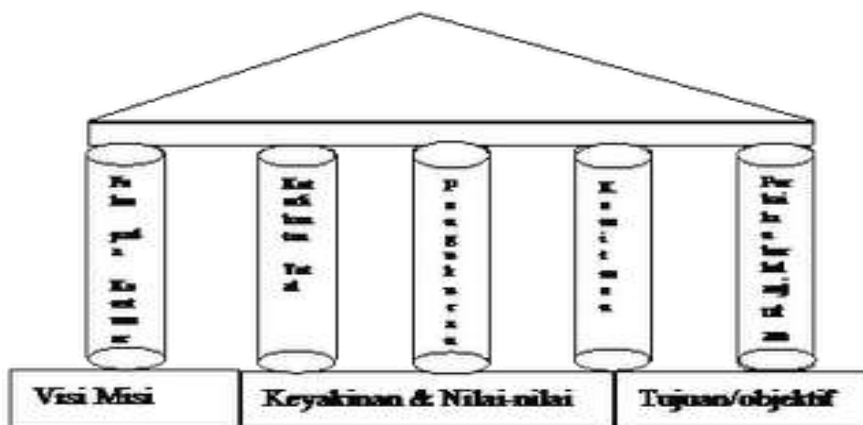
5. Perbaikan Berkelanjutan

Konsep dasar kualitas adalah segala sesuatu dapat diperbaiki. Kualitas didasarkan pada konsep bahwa setiap proses dapat diperbaiki dan tidak ada proses yang sempurna. Inilah konsep perbaikan terus menerus. Perbaikan berkelanjutan berarti sesuatu yang belum pernah dilakukan, suatu tindakan pengejaran atas kualitas, prosesnya harus secara terus-menerus diperbaiki dengan diubah, ditambah, dikembangkan dan dimurnikan.³² Lembaga pendidikan Islam harus menyediakan alat dan sumber belajar dan mengajar yang relevan

³¹Field, Joseph C., *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Terjemahan oleh Syafaruddin. Jakarta: PT Grasindo, 2000, 13

³²Sabda, Saifuddin. 2006. *Model Kurikulum Terpadu Iptek dan Imtaq*. Jakarta: Ciputat Press, 37

dengan perkembangan zaman untuk mendukung kemajuan proses pembelajaran. Gedung sekolah dan sarana prasarana pembelajaran, pelayanan yang prima terhadap peserta didik, guru, orang tua dan masyarakat, serta lingkungan pendidikan yang kondusif. Kesemuanya ini akan memberikan kontribusi positif bagi kualitas proses dan kualitas produk (lulusan) lembaga pendidikan Islam.



Gambar 1. Model sekolah/madrasah bermutu

2. Malaysia

Malaysia adalah sebuah masyarakat multietnik dan multiagama, namun mempunyai kekuatan politik dan budaya yang dominan. Sejak priode awal, Islam mempunyai ikatan erat dengan politik dan masyarakat. Islam merupakan sumber legitimasi bagi para Sultan yang memegang peran sebagai pemimpin agama, pembela iman, dan pelindung hukum Islam, sekaligus pendidikan dan nilai-nilai adat.³³ Madrasah sebagai sekolah agama Islam merupakan bentuk sekolah asal di Malaysia. Pelajar

³³Rahman Astuti dengan judul *Demokrasi di Nagara-Negara Muslim Problem dan Prospek*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1999, 166

di Madrasah kebanyakan melanjutkan pelajaran ke kawasan seperti Pakistan atau Mesir³⁴

Tujuan pendidikan di Malaysia untuk mewujudkan suatu sistem pelajaran yang memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Di Malaysia orientasi utama pendidikan adalah menciptakan *output* yang bermutu. Untuk menghasilkan *output* yang bermutu. Menurut Al-Kattani³⁵ ada beberapa hal yang menjadikan belajar bermutu, di antaranya adalah:

- a. Fasilitas perpustakaan yang cukup memadai. Buku-buku dan jurnal Islam yang diperlukan dalam kajian keislaman baik yang berbahasa Arab, Inggris, Melayu dan lain-lain sangat representatif.
- b. Bantuan keuangan dari universitas yang diberikan kepada para mahasiswa yang sedang menyelesaikan penelitian tesis dan disertasi.
- c. Pemanfaatan ICT secara optimal dalam setiap proses administrasi dan kegiatan belajar mengajar. Fasilitas ini membuat urusan menjadi mudah, singkat, dan efisien.
- d. Biaya perkuliahan relatif murah dengan fasilitas yang sangat memadai.
- e. Universitas-universitas Malaysia sering mengadakan seminar baik skala nasional maupun internasional.

Dapat dipahami banyak sekali faktor pendukung yang sarana dan menciptakan pendidikan di Malaysia menjadi menarik dan bermutu.

3. Singapura

Dalam kehidupan bermasyarakat, Singapura menganut falsafah "*together we make the difference*". Bagi Singapura, falsafah tersebut dapat dijadikan suatu kekuatan yang dapat mensinergikan semua unsur

³⁴Omar Farouk 1993. "Penelitian Sosial dan Kebangkitan Islam di Malaysia", DALAM Zaiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Ten ggara* Cet. I; Jakarta: LP3ES, 292

³⁵Hayyie Al-Kattani, Abdul dkk, *Study in Islamic countries*, Gema Insani: Jakarta. 2009, 164

masyarakat. Kementerian penerangan dan kebudayaan Singapura dalam masalah ini mempunyai visi yang didasarkan pada strategi:

- a. Membangun landasan yang kuat bagi kegiatan pendidikan, kesenian, dan kebudayaan melalui pendidikan yang berkelanjutan.
- b. Melakukan upaya untuk melahirkan lebih banyak insan-insan budaya yang profesional yang diakui oleh dunia internasional melalui program-program penemuan bakat, program beasiswa dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan.

Visi pendidikan yang dianut adalah “*First World Economy, World Class Home*” dengan menekankan pentingnya sistem pendidikan yang berkualitas tinggi. Siswa dituntut mempelajari cara dan menciptakan ilmu-ilmu yang baru. Selain itu keberadaan lembaga swadaya masyarakat Islam (LSM) juga tak kalah pentingnya dalam upaya menjadikan muslim dan komunitas Islam negeri itu potret yang maju dan progresif. Berbagai LSM Islam yang ada, terbukti berperan penting dalam agenda-agenda riil masyarakat muslim. Saat ini, tidak kurang dari sepuluh LSM, di antaranya adalah: *Association of Muslim Professionals (AMP)*, *Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura (KGMS)*, *Muslim Converts Association (Darul Arqam)*, *Muhammadiyah*, *Muslim Missionary Society Singapore (Jamiyah)*, *Council for the Development of Singapore Muslim Community (MENDAKI)*, *National University Singapore (NUS) Muslim Society*, *Perdaus (Persatuan Dai dan Ulama Singapura)*, *Singapore Religious Teachers Association (Pergas)*, *Mercy Relief (Center for Humanitarian)*, *International Assembly of Islamic Studies (IMPIAN)*, dan Lembaga Pendidikan al-Quran Singapura (LPQS).³⁶

Lembaga pendidikan Islam (madrasah) dikelola secara modern dan profesional, dengan kelengkapan perangkat keras dan lunak. Seluruh madrasah di bawah naungan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), sistem pendidikan diterapkan dengan memadukan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Keenam madrasah itu adalah madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah (No. 9 Winstedt Road), Madrasah Al-Maarif Al-Islamiah (No. 14,

³⁶(<http://www.voa-islam.com/news/singapore/2009/0/12/114/islam-di-singapura-menuju-komunitas-muslim-yang-maju/>).

Ipoh Lane), Madrasah Alsagoff Al-Islamiah (111. Jalan Sultan), Madrasah Aljunied Al-Islamiah (395, Victoria Street), Madrasah Al-Arabiyyah Al-Islamiah (No. 12, Jalan Selamat), dan Madrasah Wak Tanjong Al-Islamiah (589-D Sims Avenue).³⁷

4. Mesir

Pemikiran baru seperti dari Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, dimana untuk mewujudkan masyarakat berkualitas (masyarakat madani) adalah menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subyek yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri, dan professional karena lembaga pendidikan adalah dapur masa depan suatu masyarakat dan bangsa. Lembaga-lembaga pendidikan menjadi arena perebutan pengaruh dari kelompok-kelompok masyarakat untuk kepentingan kelompoknya.

Pendidikan di Mesir Al-Azhar merupakan lembaga yang memiliki jasa dalam kemajuan umat Islam dalam bidang pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Al-Azhar yang merupakan Universitas Islam tertua, sekarang bukan hanya universitas keagamaan saja, tetapi meliputi fakultas-fakultas: darul ulum, kulliat al bannat, fakultas sains, fakultas pertanian, fakultas ekonomi, fakultas sastra, bahkan fakultas kedokteran.³⁸

Pada masa kepemimpinan Syaikh Mahmud Syaltut, rektor Al-Azhar ke-41 dibentuk organisasi untuk mengatur "pemeliharaan al-Quran" dan lahir fakultas-fakultas baru tersebut memiliki tujuan, antara lain: (1) mengemukakan kebenaran dan pengaruh turas Islam terhadap kemajuan umat manusia dan jaminannya terhadap kebahagiaannya di dunia dan akhirat; (2) memberikan perhatian penuh terhadap kebangkitan turas ilmu, pemikiran, dan kerohanian bangsa Arab Islam; (3) menyuplai dunia Islam dengan ulama-ulama aktif yang beriman, percaya terhadap diri sendiri,

³⁷Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 114.

³⁸Binti Mauna, *Perbandingan.....*, 98

mempunyai keteguhan mental dan ilmu yang mendapat tentang akidah, syari'ah, dan bahasa al-Quran; (4) mencetak ilmuwan agama yang aktif dalam semua bentuk kegiatan, karya, kepemimpinan dan menjadi contoh yang baik, serta mencetak ilmuan dari berbagai ilmu pengetahuan yang sanggup aktif dalam dakwah Islam yang dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan dan pelajaran yang baik di luar dan di dalam Republik Arab Mesir; (5) meningkatkan hubungan kebudayaan dan ilmiah dengan universitas dan lembaga ilmiah Islam di luar negeri. Dampak dari kembalinya lulusan Kairo pada tahun 30-an dirasakan dalam pola pendidikan yang ada di Indonesia

5. Arab Saudi

Civil society di Arab sangat lemah tidak seperti yang ada di Indonesia. Kenyataan ini banyak terkait dengan budaya Arab yang lebih menekankan tribalisme atau kabilahisme daripada ikatan asosiasi sukarela yang relatif bebas dari sektarianisme. Tambahan lagi, kekuasaan otoritarianisme yang relatif lama di dunia Arab hampir tidak memberikan ruang banyak kemunculan dan penguatan *independent civil society*. Jika masyarakat madani ada di dunia Arab, itu lebih banyak dalam bentuk asosiasi profesional yang cenderung steril politik dan memiliki minat dan kepentingan relatif sempit. Lagi pula mereka memiliki keanggotaan terbatas tidak menjangkau masyarakat luas yang bersifat lintas kelompok dan segmen. Konsekuensinya, kepemimpinan sipil alternatif tidak berhasil muncul; padahal kepemimpinan semacam ini sangat krusial untuk memainkan sebagai 'jembatan' dan 'penengah' (*bridging and mediating role*) di antara kelompok-kelompok yang terlibat konflik politik kepentingan yang cenderung meningkat sepanjang masa transisi dan konsolidasi demokrasi.³⁹

³⁹ Makalah yang disampaikan pada Klub Kajian Agama (KKA) Yayasan Paramadina. Jakarta, 17 Juli 2013.

F. Dampak dan Problem kebijakan Pemerintah dalam masalah Standarisasi Mutu pada Pendidikan Islam

Pendidikan Islam seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah yang tidak ringan. Problem/permasalahannya antara lain, yaitu *pertama*, adalah rendahnya mutu pendidikan. Dalam rangka mengetahui mutu pendidikan pada madrasah dengan cara mengukur kekuatan dan kelemahan. Berikut contoh latihan pengukuran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini;⁴⁰

Pilar-pilar Mutu	Kekuatan	Kelemahan
Fokus pada <i>costumer</i>	Secara berkala mengadakan pertemuan dengan staf, siswa, orangtua dan wakil-wakil komunitas untuk merumuskan keinginanya	Tidak menanggapi keluhan/kepedualian staf, siswa orang tua atau komunitas.
Keterlibatan total	Para staf sama-sama bertanggung jawab untuk memecahkan masalah saat pengembangan sekolah bermutu terpadu	Secara umum, staf menunggu manajemen atau orang lain memecahkan masalah.
Pengukuran	Menggumpulkan data untuk mengukur perbaikan dan untuk mengembangkan solusi	Tidak mencatat kemajuan. Hanya berjalan menuju masalah berikutnya.
Komitmen	Manajemen memiliki komitmen untuk memberikan pelatihan, sistem dan proses yang dibutuhkannya untuk mengubah cara kerja guna memperbaiki mutu dan meningkatkan produktivitas	Dukungan untuk mutu terisolasi dan tidak diakui oleh staf, siswa dan komunitas.

⁴⁰Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam....*198.

Perbaikan berkelanjutan	Secara konstan mencari cara untuk memperbaiki setiap proses pendidikan	Mengisi dengan hal-hal sebagaimana adanya sekalipun ada masalah tidak menganggapnya sebagai masalah.
-------------------------	--	--

Kedua, adalah problem yang berkenaan dengan kepuasan pelanggan (masyarakat) terhadap layanan suatu lembaga pendidikan. Hal ini dimaksudkan bahwa layanan suatu lembaga pendidikan dikatakan bermutu baik, jika lembaga pendidikan tersebut dapat memberikan kepuasan pelayanan kepada pelanggannya. Kepuasan pelanggan berarti sistem pendidikan harus dilaksanakan demi pencapaian pihak-pihak yang berkepentingan (para orang tua, pemakai lulusan, penyandang dana, pemerintah, dan pihak lain yang selama ini peduli dan turut berpartisipasi dalam peningkatan mutu sekolah/madrasah. Dengan demikian keberhasilan madrasah/sekolah juga dapat diukur dari tingkat kepuasan pelanggannya baik pelanggan internal maupun eksternal.

Ketiga, adalah bahwa *civil society* dalam pendidikan Islam yang terjadi di Indonesia ternyata semua itu masih dalam sekedar tatanan teoritis/ tatanan konseptual belum sampai pada tatanan teoritis/praktis. Karena masih banyak diskriminasi hak asasi setiap manusia dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, maka dari itu perlu sekali, kita bersama pemerintah membuat konsep-konsep demokrasi dengan tatanan teoritis/praktis sehingga semua manusia antara orang kalangan atas (kaya) dan orang kalangan bawah (miskin) mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu sehingga tidak ada diskriminasi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslim. 2003. *Islam Sebagai Kritik Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Al-Kattani, Hayyie Abdul dkk. 2009. *Study in Islamic Countries*. Jakarta: Gema Insani.
- Arcaro, Jerome S. 1995. *Quality in Education: An Implementation Handbook*. St. Lucie Press.
- Astuti, Rahman. 1999. *Demokrasi di Nagara-Negara Muslim Problem dan Prospek*. Cet. I. Bandung: Mizan.
- Azra, Azyumardi. 2004. *Menuju Masyarakat Madani*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Daulay, Haidar Putra. 2009. *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Farouk, Omar. 1993. "Penelitian Sosial dan Kebangkitan Islam di Malaysia" dalam Zaiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* Cet. I; Jakarta: LP3ES.
- Field, Joseph C. 2000. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Terjemahan oleh Syafaruddin. Jakarta: Grasindo.
- Hasibuan, Lies. 2004. *Melejitkan Mutu Pendidikan: Refleksi, Relevansi dan Rekonstruksi Curriculum*. Jambi: SAPA Project.
- Hikam, Muhammad A.S. 2000. *Islam, Domekratisasi, dan PemberdayaanCivil Society*, Jakarta: Erlangga
- Maunah, Binti. 2011. *Perbandingan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Nur Rokhim. 2012. *Civil Society di Indonesia dalam Perspektif Islam*, (Al-Manar, Jurnal Sejarah dan Peradapan Islam, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Volume 11, No. 05, April 2012.

- Sabda, Saifuddin. 2006. *Model Kurikulum Terpadu Iptek dan Imtaq*. Jakarta: Ciputat Press.
- Sallis, Edward. 2002. *Total Quality Managemnt in Education*. London: Kogan Page.
- Siswanto. 2006. *Budaya Madrasah: Strategi Pengembangan Mutu Pendidikan*, (Tadris Jurnal Tarbiyah STAIN Pamekasan, nomor: sti. 213/PP.009/91/2006)
- Tafsir, Ahmad. 2006. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Terence Chong, James Gomez & Lenore Lyons. 2005. *Democracy and Civil Society NGO Politics in Singapore*. Journal of Social Issues in Southeast Asia. Singapore.
- Tim MKD IAIN SA. Surabaya. 2012. *Civic Education*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yasin, A. Fatah. 2008. *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Zubaedi. 2005. *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.